

Pembangunan Sosial Ekonomi di Indragiri Hilir Riau Perspektif Teori Kebijakan Fiskal Abdul Mannan

Salmia

STAI Ahsanta Jambi
salmia@ahsanta.ac.id

ABSTRACT

Fiscal Policy is a government's policy related to regional and national income and expenditure. This policy is very important in a region because this policy not only discusses how a region or state gets fund and utilizes the fund to develop the region, but also discusses how fiscal policy is able to create development and prosperity for people's socio-economic life. The glory of Islam in the past has also convinced people that the economic development system that was used could survive and had a well-known history, so the theory of Abdul Mannan, who was a contemporary Muslim economist, could be used, expecting that the glory of Islamic countries in the past could be repeated nowadays. Mannan wrote in his fiscal policy perspective based on Islamic law. The core of Mannan's fiscal policy in socio-economic development is the principles of happiness (at-targib) for society and socio-economic improvement, as well as spiritual and moral development. Therefore, this study focused on the Situation of Socio-Economic Development of Indragiri Hilir Regency whose majority of the population is Moslem; whether the implementation of fiscal policy in Indragiri Hilir has been relevant to Mannan's theory. Such question could be answered after conducting a research in Indragiri Hilir using interview technique to several informants from Local Government Officials, Members of Parliament and Indragiri Hilir Society. The results showed that the development in Indragiri Hilir focuses more on plantation development because the majority of population works as farmers and gardening. In addition, several things that are not yet relevant are: non conducive regional bureaucracy and uneven infrastructure development.

Keywords: *Fiscal Policy, Socio-Economic Development, Abdul Mannan, Indragiri Hilir.*

PENDAHULUAN

Kejayaan Islam dimasa lalu meyakinkan ummat Islam bahwa sistem ekonomi yang digunakan bisa bertahan dengan baik dan memiliki sejarah dunia yang terkenal dimasa itu, hal ini

dibuktikan oleh Andalusia. Andalusia yang merupakan salah satu negara Islam yang sering diangkat sebagai model terbaik karena meninggalkan kesan dan warisan yang luar biasa dalam sejarah

dunia hingga saat ini. Negara Andalusia juga dianggap besar karena telah membuka pintu kemajuan bagi peradaban barat, ini merupakan bukti Islam sudah sejak dulu membangun masyarakat untuk menciptakan masyarakat Madani yakni masyarakat yang memiliki peradaban yang baik dari segi lahiriah dan rohaniah diantaranya adanya kemajuan sosial, kemakmuran ekonomi, pendidikan dan agama (Muammar, 2009).

Sistem ekonomi islam merupakan solusi untuk menjadikan sebuah negara bertahan dengan pengelolaan yang baik, Indonesia memiliki potensi kekayaan Alam dan potensi-potensi lain yang apabila dikelola dengan baik oleh masyarakat dan terutama pemerintah yang tidak menyalah gunakan kewenangan yang ada. Ilmu ekonomi Islam seperti halnya ilmu ekonomi modern tetapi tidak hanya berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, bahkan ilmu ekonomi islam telah mengusahakan keseimbangan yang langgeng antara pendapatan dan pembelanjaan guna mencapai sasaran keuntungan sosial yang maksimum (Mannan, 1997). Pencapaian kesejahteraan dan keuntungan sosial merupakan perbedaan mendasar. Ilmu ekonomi Islam memiliki keterbatasan tertentu misalnya pengakuan terhadap ke Esaan Tuhan dan nilai moral dalam suatu harta namun lebih luas dari pada Ilmu ekonomi modern karena tidak diperbolehkan memaksakan aktivitas ekonomi yang tidak menghasilkan kesejahteraan.

Pendekatan pembangunan sosial ekonomi merupakan kewajiban pemerintah yang merupakan tujuan dari kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal adalah

kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara atau daerah melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. (Hermansyah, 2015). Pentingnya kebijakan fiskal dalam suatu Negara akan menentukan bagaimana perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di Negara tersebut. Ketika kebijakan fiskal dibuat dan diterapkan pada saat pendapatan tinggi, tetapi pengeluaran tidak maksimal dan tidak membuahkan hasil ataupun tidak mencapai visi misi pemerintah dalam suatu Negara atau daerah, maka kebijakan fiskal tersebut dianggap gagal, begitupun jika tidak ada kebijakan dalam pendapatan maka Negara tidak akan maksimal mendapatkan sumber dana.

Teori Abdul Mannan diharapkan dapat menjadi Barometer untuk mencapai kesejahteraan, distribusi kemakmuran dan kebahagiaan yang merata bagi masyarakat sesuai konsep islam yang diadopsi oleh Abdul Mannan. Teori Abdul Mannan juga banyak memaparkan terkait solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ekonomi islam (Ulum, 2009), untuk memberikan batasan kewajiban dan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan pemerintah daerah. Ada beberapa konsep yang ditawarkan dalam ekonomi Islam pemikiran Abdul Mannan yakni teori konsumsi, produksi, distribusi dan paling banyak dikaji atas pemikirannya yakni kebijakan fiskal yang sangat *urgent* dalam suatu kajian di sebuah Negara ataupun daerah. Alasan penulis menggunakan teori kebijakan fiskal Mannan dalam melihat suatu pembangunan sosial ekonomi karena Mannan sendiri merupakan tokoh pemikir Islam kontemporer yang sukses

memberikan sumbangsi pemikiran terkait bank syariah di dunia dengan menghilangkan bunga dan merubah paradigma ekonomi.

Kajian ekonomi islam solusi terhadap kebijakan fiskal dalam suatu daerah masih sangat jarang dikaji, untuk itu dalam lingkup yang masih sederhana penulis ingin melihat pengaplikasian kebijakan fiskal dari teori Mannan yang berlandas hukum Islam dan kesejahteraan untuk ummat dengan pendekatan sistem ekonomi Islam. Bagian mana saja yang sudah diterapkan di Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Terkait kebijakan apa saja yang menurut Mannan dalam penerapan kebijakan fiskal yang masih banyak menguntungkan para pembuat kebijakan dan masih merugikan masyarakat itu sendiri. Teori Mannan bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk dari kebijakan fiskal yang diambil tanpa pertimbangan Agama, moral dan hal-hal mendasar dalam ekonomi dan islam.

Jurnal *Kebijakan Fiskal Negara Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam* yang ditulis oleh Supangat memaparkan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam bersifat lentur dan terbuka terhadap ijtihad. Nash-nash terkait dengan kebijakan fiskal tidak terlepas dari keadaan sosio-historis masyarakat Islam awal. Beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah merupakan reformulasi pajak yang diterapkan pada masa awal Islam. Dengan demikian, dalam jurnal Supangat ini memaparkan sistem kebijakan fiskal Negara Indonesia selama ini masih dalam koridor syari'ah. Hanya saja, implementasi sistem tersebut masih jauh dari yang diharapkan, jika tidak dikatakan bertolak belakang

(Supangat, 2013). Sehingga perlunya sistem yang nyata dan terealisasi mewujudkan sistem kebijakan fiskal yang tidak menciderai masyarakat. Persamaan jurnal Supangat dengan jurnal ini, yakni mencari kesesuaian kebijakan fiskal dengan kebijakan fiskal Islam, perbedaanya perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil ide dan gagasan Abdul Mannan. Supangat dalam jurnalnya untuk menjadikan zakat sebagai salah satu instrument fiskal di Indonesia sedangkan peneliti ingin melihat sejauh mana pengaruh kebijakan fiskal terhadap peningkatan sosial masyarakat khususnya di Indragiri Hilir.

Indragiri Hilir di jadikan objek penelitian karena potensi pertanian dan perkebunan didaerah ini cukup mumpuni yakni hamparan perkebunan kelapa di Indragiri Hilir ada 432 ribu hektar baik itu kelapa dalam dan hibrida ("Bupati Inhil 'Wardan' Paparkan Keunggulan Pertanian Kelapa Dihadapan Komisi B DPRD Riau 2015," 2015) Potensi tersebut seharusnya mendukung ekonomi daerah, mayoritas penduduknya beragama islam juga seharusnya bisa menjadi potensi yang mumpuni dalam menerapkan sistem ekonomi islam. Harapan masyarakat dengan potensi alam yang sangat baik mendukung perkembangan sosial ekonomi kearah yang lebih baik. Namun permasalahan pembangunan infrastruktur yang sering terhambat dan cenderung lambat penaganannya terjadi di daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau fakta ini didapatkan dari beberapa kecamatan dan desa yang mengalami kerusakan jalan serta minimnya perbaikan infrastruktur dan pasokan listrik. Penerapan kebijakan fiskal Mannan merupakan harapan bagi

seluruh masyarakat sehingga pembangunan sosial ekonomi daerah semakin berkembang dan menguntungkan masyarakat luas.

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui potret pembangunan sosial ekonomi dari kebijakan fiskal pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir sehingga melihat langsung proses pembangunan sosial yang sudah dilakukan di daerah tersebut dan menganalisis kesesuaian kebijakan fiskal Kabupaten Indragiri Hilir dengan kebijakan fiskal Abdul Mannan apakah sesuai dengan teori yang dikemukakan Abdul Mannan.

LANDASAN TEORI

Tulisan Fahrul Ulum dalam jurnal yang berjudul *Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan*, hasil dari penelitian kualitatif ini merumuskan bagaimana pemikiran Mannan terkait kesejahteraan masyarakat dan merumuskan hal-hal yang harus dilakukan masyarakat, swasta dan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dengan kepemilikan yang beradil dan taat aturan serta bermoral, produksi dan distribusi yang harus sesuai dengan sumber hukum dan berkeadilan. Mannan banyak merumuskan perkembangan Ilmu Ekonomi dari segi Teori dan menolak pendapat pemikir marxis dan kaum neo klasik positivis (Ulum, 2009).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan jurnal ini yakni pembahasan mengenai kebijakan dan pemikiran Abdul Mannan terkait kebijakan fiskal yakni lebih spesifik mengenai bagaimana cara kesejahteraan masyarakat umum didalam suatu daerah atau negara. Jurnal ini memaparkan

semua teori/pemikiran Abdul Mannan, sedangkan penulis hanya pemikiran Abdul Mannan terkait kebijakan Fiskal dan membandingkan dengan kebijakan Fiskal di daerah. Selain itu ada beberapa penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yang membahas mengenai pembangunan sosial ekonomi serta kebijakan fiskal Abdul Mannan (Apriyani, 2016; Mustaqimah, Hartoyo, & Fahmi, 2017; Nukra, 2017; Sarjono & Anwar, 2018; Syahputra, 2015).

Kebijakan Fiskal Mannan

Kebijakan fiskal dan anggaran belanja dalam islam menurut Mannan bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan yang berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Menurut Mannan Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai pengeluaran pendapatan. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif atau meniadakan insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah. Mannan juga mengutip yang dikatakan Profesor R.W. Linson “dalam membuat pengeluaran pemerintah dan dalam memperoleh pemasukan pemerintah, penentuan jenis, waktu dan procedural yang harus diikuti,” hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan khas tertentu (Mannan, 1997).

Mannan meghendaki kebijakan fiskal yang tidak hanya meletakkan orientasi material, akan tetapi perlu meletakkan perspektif nilai-nilai spiritual. Peranan negara adalah

merestrukturisasi pola dan organisasi produksi yang menurut Mannan (1984) mencakup hal-hal berikut: 1) Penekanan pada kerja sama dan persaingan yang diawasi, 2) Penekanan pada bagi hasil dan partisipasi berkeadilan untuk menggantikan bunga; 3) Kebijakan moneter dan fiskal yang terdefiniskan dengan jelas demi stabilisasi; 4) Kebijakan upah yang bagus; 5) Memajukan integrasi ekonomi antar negara Muslim; 6) Perlindungan umum atas kegiatan ekonomi. 7) Penyediaan kebutuhan dasar bagi semua orang. Pemerintah harus mengambil peran penting dalam perekonomian karena alokasi sumber daya tidak dapat diserahkan pada kebebasan individu dalam kaitannya pencapaian kesejahteraan bersama. Dengan mendukung kontrol dan pengawasan Mannan menyatakan bahwa keadilan lebih penting daripada efisiensi, terutama jika berhubungan dengan kebutuhan dasar.

Berkaitan dengan instrumen fiskal dalam perekonomian, Mannan menganggap zakat sebagai poros keuangan Negara Islam. Zakat merupakan sumber utama penerimaan yang tidak dipandang sebagai pajak lebih sebagai kewajiban agama karena kedudukannya sebagai salah satu rukun Islam. Zakat merupakan sebuah elemen sosialisme Islam yang digagasnya. Meletakkan wakaf sebagai instrumen kebijakan fiskal yang potensial dan zakat sebagai pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mannan juga menyatakan bahwa system produksi dalam Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif. Kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk

kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang. Kriteria subjektif dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci Al-Qur'an dan sunnah. Jadi dalam Islam keberhasilan sebuah system ekonomi tidak hanya disandarkan pada segala sesuatu materil tapi agar bagaimana setiap aktifitas ekonomi bisa menerapkan nilai-nilai, norma, etika atau dengan kata lain akhlak yang baik dalam berproduksi (Mannan, 1997).

Pembangunan Sosial Ekonomi Mannan

Pembangunan ekonomi sosial menurut Abdul Mannan yakni pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat muslim berdasarkan prinsip menggembirakan (*at-targib*) yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi pembangunan ekonomi dalam Islam untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*al-hayat at-tayibah*) sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an. Tujuan pembangunan ekonomi untuk merubah masyarakat sehingga mendapatkan ridho Allah.

Mannan memandang bahwa "keterlibatan Islam yang bersifat pragmatis dan realistik bagi si miskin adalah sangat tulus sehingga distribusi pendapatan menjadi pusat berputarnya pola dan organisasi produksi dalam suatu negara Islam". Mannan menambahkan bahwa "Pertimbangan distribusi yang harus memengaruhi produksi barang jasa, sehingga la juga menjadi indikator konsumsi".

Berkaitan dengan produksi dalam Islam, menurut Mannan, tujuan perusahaan bukan hanya

memaksimalkan keuntungan, melainkan juga harus memperhatikan moral, sosial, dan kendala institusional. Perusahaan tidak lagi dipandang hanya sebagai pemasok komoditas tetapi juga sebagai penjaga bersama (yaitu, bersama pemerintah) bagi kesejahteraan ekonomi dan masyarakat. Proses produksi menurut Mannan (1984) adalah kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Nilai persaudaraan, jika diaplikasikan ke dalam lingkungan ekonomi, akan melahirkan lingkungan kerja sama dan bukan persaingan; penyebaran lebih luas dan bukan konsentrasi ataupun eksploitasi sumber daya alam (manusia) lebih lanjut. Akhirnya, menurut Mannan, produksi merupakan proses sosial. Dalam proses sosial ini ia menetapkan keputusan produksi tidak seperti pendekatan neoklasik yang memandang keduanya secara terpisah. Mannan setuju dengan gagasan pembagian kerja dan spesialisasi untuk mem produksi secara efisien dan adil, tetapi secara konstan menekankan perlunya humanisasi proses produksi.

Secara umum, pemikiran ekonomi yang disampaikan oleh M.A. Mannan adalah sebagai berikut;

- 1) Perekonomian Islam diharapkan akan bekerja pada perpotongan antara sistem pasar dan perencanaan terpusat.
- 2) Kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah ada pada Allah Sebagai wakil amanah (khalifah-Nya) di muka bumi, manusia diharuskan menggunakan semua sumber daya yang telah disediakan untuk kebaikan dan kemaslahatannya.

- 3) Pemerintah harus mengambil peran penting dalam perekonomian karena alokasi sumber daya tidak dapat diserahkan pada kebebasan individu dalam kaitannya dalam pencapaian kesejahteraan bersama.
- 4) Proses produksi merupakan usaha kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kesejahteraan ekonomi di masyarakat.

Pembangunan Sosial Ekonomi

Konsep pembangunan ekonomi islam, pembangunan ekonomi yang disertai perubahan sosial budaya, akan banyak menimbulkan masalah moral, oleh karena itu alternatif yang dapat dilakukan oleh ilmu ekonomi agar merespon aspek moral dengan cara mengaitkan pembangunan ekonomi dengan agama (Mth, 2003). Dalam jurnal Asmuni teori Khursyid pembangunan ekonomi tidak terbatas variabel ekonomi semata tetapi aspek moral dan sosial, material dan spiritual. Khursyid juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada seluruh generasi menghapus riba dan mewajibkan zakat. Pembangunan ekonomi untuk merealisasikan desentralisasi.

Pembangunan Sosial

Secara konseptual, istilah pembangunan sosial (*social development*) sering dipertukarkan dengan pembangunan manusia (*human development*) dan pembangunan kesejahteraan sosial (*social welfare development*) memiliki konsentrasi yang relatif berbeda, meskipun bersinggungan. pembangunan manusia

memfokuskan perhatiannya pada peningkatan modal manusia (*human capital*) yang diukur melalui dua indikator utama; pendidikan (misalnya angka melek huruf) dan kesehatan (misalnya angka harapan hidup). Pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial (Sukma, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *Grounded Theory* dan *Triangulasi data*. *Grounded Theory* adalah merupakan salah satu jenis pertanyaan pada pendekatan model penelitian kualitatif. Dalam buku Herdiansyah bahwa pendekatan *grounded theory* adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa dipelajari. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Abdul Mannan terkait Kebijakan Fiskal di dalam suatu pemerintahan. Akan lebih ideal jika ada kesesuaian antara kebijakan fiskal di suatu daerah dengan kebijakan fiskal Abdul Mannan karena Mannan mendasari teori kebijakannya dengan nilai-nilai Islam dan konteks Pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Pertanyaan lanjutan pada *grounded theory* dapat dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek tahapan pengodean (Herdiansyah, 2014).

Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan dan sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai dengan substansi. Sehingga lokasi penelitian ini

yaitu di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tepatnya pada lembaga pemerintah daerah yang membuat kebijakan fiskal. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Purposive adalah teknik penentuan Informan dengan cara peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Indragiri Hilir (Inhil) adalah salah satu dari 12 Kabupaten/ Kota di Riau yang terletak di selatan Provinsi Riau (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016). Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 0.36' Lintang Utara dan 1.07' Lintang Selatan, dan antara 102.32'-104.10' Bujur Timur. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 11.605,97 KM². Kabupaten Indragiri Hilir, dikenal juga sebagai Negeri Seribu Parit, dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana penghubung atau transportasi yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah dengan menggunakan *speed boat* atau perahu kecil lainnya. Diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari dari danau Singkarak (Provinsi Sumatera Barat) yang bermuara di selat berhala.

Mayoritas penduduk Kabupaten Indragiri Hilir memeluk Agama Islam.

Hal ini digambarkan dari banyaknya jumlah Masjid dan Surau/ Mushallah sebagai tempat ibadah Ummat Islam pada tahun 2016 Kantor kementerian agama kabupaten Indragiri Hilir dalam data Badan Pusat Statistik inhil 2016. Jumlah bangunan Masjid 846, surau atau mushallah 756. Kota Tembilahan juga memiliki slogan “*Tembilahan Kota Ibadah*”. Walaupun Kota “Ibadah” merupakan sebuah singkatan dari kata Indah, Bersih, Aman, Damai, Harmonis namun kata ibadah mencerminkan masyarakat yang religius. Di kabupaten Inhil hanya memiliki 1 gereja, 3 klenteng dan 6 vihara (Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2017).

Penghasilan utama penduduk didaerah kabupaten Indragiri Hilir berasal dari perkebunan dan pertanian. Hal ini didukung karena secara umum tanah di kabupaten Indragiri Hilir memiliki dua golongan tanah mineral dan tanah organik. Jika dilihat dari lapangan usahanya, penduduk Kabupaten ini sebagian besar bekerja disektor pertanian dan perkebunan. Pekerja disektor pertanian mencapai 79,31 persen, disektor perdagangan sebesar 6,31 persen, industry 6,02 persen, jasa masyarakat, sosial dan perorangan 5,21 persen, dan lainnya (pertambangan, listrik, gas dan air minum, kontruksi, transportasi serta lembaga keuangan) hanya 3.15 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2014).

Potensi luasan dan produksi kelapa di Indragiri Hilir terbesar didunia namun belum mampu untuk dikembangkan secara optimal untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Lebih kurang 432 ribu hektar perkebunan kelapa dimiliki kabupaten yang berjuluk negeri seribu

parit (Rubby, 2018). Produk dari hasil perkebunan petani tidak dikelola sehingga delama yang terjadi produk pertanian mengalami kelemahan dalam persaingan. Kurangnya perhatian pemerintah mengakibatkan harga jual untuk produk kelapa tanpa pengolahan milik masyarakat terus berfluktuatif dengan trend menurun, sehingga sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat Indragiri Hilir. Hal ini tentulah sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat jika tidak ditangani secara cepat tanggap mengingat masyarakat Indragiri Hilir sendiri merupakan masyarakat yang mayoritas bekerja di perkebunan.

Sedangkan kondisi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang merupakan *indicator* yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Secara makro selama periode 2011-2015 terjadi peningkatan kemakmuran dikabupaten INHIL bahkan pertumbuhan perkapitanya sebesar 8.59% per tahun lebih tinggi dari pendapatan per kapita provinsi Riau yang justru menurun (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016). Permasalahan apakah pertumbuhan ini riil dilapangan mengalami pertumbuhan atau hanya pertumbuhan yang semu.

Kriminalitas di suatu daerah juga mempengaruhi peningkatan atau tidaknya suatu kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Secara teori dinyatakan bahwa factor penyebab seseorang melakukan tindak kriminal antara lain (i) kemiskinan, (ii) kesempatan, (iii) kehendak bebas, keputusan yang hedonistic dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial, (iv) sifat-sifat anti-sosial bawaan,

dan (v) hukuman kepada pelaku kriminal yang tidak proporsional (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016). Pada periode 2011-2014 jumlah tindakan kriminal di kabupaten Indragiri Hilir memiliki *trend fluktuatif* menurun. Dari beberapa informan disebutkan bahwa, kejahatan yang banyak terjadi dan agak susah untuk dibendung adalah penggunaan obat-obat terlarang dan juga penggunaan lem yang banyak digunakan anak-anak.

Kondisi lain untuk melihat tingkat pembangunan sosial ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM di Indonesia merupakan data strategis karena sebagai ukuran pemerintah juga digunakan dalam menentukan Dana Alokasi Umum. IPM INHIL pada 2014 lebih rendah dibanding dengan IPM Provinsi Riau. Sedangkan untuk angka harapan hidup kabupaten Indragiri Hilir dibandingkan dengan harapan hidup Indragiri hulu dan Provinsi Riau relatif lebih rendah, hal ini disebabkan kualitas sanitasi lingkungan baik karena factor alam maupun pembangunan yang masih terbatas serta pembiayaan pembangunan kesehatan yang juga terbatas (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016).

Potret Pembangunan Sosial Ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir

Pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial (Sukma, 2015). Dalam pembangunan sosial, ekonomi sangat berperan secara beriringan sehingga pembangunan sosial yang baik tentu juga akan diikuti dengan pembangunan

ekonomi yang baik. Pembangunan sosial ekonomi melibatkan seluruh masyarakat yang bermukim didaerah atau wilayah tersebut karena masing-masing elemen mengambil peran dan memiliki porsi untuk kemajuan daerah.

Penelitian yang di lakukan di Kabupaten Indragiri Hilir, terkait bagaimana pemerintah dan pejabat daerah mengelola kebijakan fiskal dalam program pembangunan sosial ekonomi masyarakat di daerah kabupaten Indragiri Hilir. Namun realita yang terjadi dalam masyarakat yang merasakan kebijakan fiskal banyak keluhan terkait pembangunan sosial ekonomi di Inhil terutama terkait Infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah. Infrastruktur yang masih sangat minim juga dikarenakan Indragiri Hilir termasuk wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) Walaupun ekonomi daerah dan masyarakat Indragiri Hilir menurut Informan tidak mengalami penurunan dan mulai memiliki kehidupan sosial yang baik, namun sarana dan prasarana belum tercukupi. Akses masyarakat untuk menuju desa, kecamatan dan kabupaten lain sangat sulit. Terbukti dari transportasi yang banyak digunakan masyarakat tidak memiliki perlengkapan yang *safety* juga beberapa transportasi dinilai belum memenuhi standar sebagai transportasi umum.

Pembangunan sosial ekonomi juga sangat ditentukan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk Realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp1,82 triliun Bila dibandingkan dengan Belanja Daerah dan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1,71

triliun dan mengalami defisit sebesar Rp142.371.009.722,25. Namun dari wawancara dari pihak Badan Perencanaan Pembangunan daerah bahwa defisit anggaran selalu terjadi walaupun untuk tahun-tahun kebelakang mulai mengalami penurunan dan realisasi pembangunan daerah sudah mulai mengarah kearah yang lebih baik. Bukan dalam pemasaran data angka-angka saja namun juga perlu realisasi dalam bentuk fakta di masyarakat.

Sebuah penelitian dari Caska dan RM. Riadi juga memaparkan bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi/daerah yang cukup kaya baik dengan hasil bumi berupa migas dan hasil perkebunan berupa kelapa sawit, nenas, kelapa, karet dan lainnya. Akan tetapi masyarakat masih belum puas dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masing-masing daerah. Hal ini tentu saja akan menimbulkan gejolak bagi daerah yang masyarakat tidak puas (Caska & Riadi, 2008). Jika tidak ada pengembangan produk ini akan menjadi masalah baru karena perbedaan kebutuhan yang semakin berkembang.

Pembangunan sosial ekonomi juga sangat berkaitan dengan keamanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat di Indragiri Hilir. Selama periode 2011 – 2014, jumlah tindak kriminal di kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun. Secara keseluruhan angka kriminalitas di kabupaten Indragiri Hilir menurun yaitu dari terdapat 1 kejadian pada untuk setiap 1.113 penduduk menjadi 1 kejadian kriminal pada setiap 1.824 penduduk.

Kejahatan konvensional adalah kejahatan yang paling sering terjadi diikuti dengan kejahatan transnasional

dan kejahatan terhadap kekayaan Negara. Inhil sendiri merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat mumpuni dan dikelola oleh masyarakat sendiri sehingga investasi perkebunan di Indragiri Hilir masih di kuasi masyarakat local. Namun menurut penelitian Caska dan RM. Riadi Untuk daerah atau kabupaten yang maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah pada Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar (Caska & Riadi, 2008). Sehingga peneliti berasumsi banyaknya kendala ekonomi, deficit anggaran yang terjadi dan pembangunan sosial yang belum maksimal di Indragiri Hilir diakibatkan penyelewengan dana-dana daerah yang seharusnya untuk pembangunan daerah.

Hal utama yang menjadi penyebab kerusakan dan pembangunan Infrastruktur Indragiri Hilir sering terhambat dan dinilai lambat karena struktur pertanahan dan daerah Indragiri Hilir yang agak unik dibandingkan daerah lain. Dimana struktur tanah gambut dan rawa sehingga proses pembangunan membutuhkan anggaran dana yang lebih besar dan proses yang lebih lama. Padahal Infrastruktur merupakan fasilitas wilayah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Potret masalah yang kemudian peneliti dapatkan dari pembangunan sosial ekonomi di Indragiri Hilir, bahwa pembangunan infrastruktur dinilai lambat, pendapatan masyarakat tidak mengalami signifikan, iklim bisnis di Indragiri Hilir, tidak berjalan dengan baik dan kurangnya sinergi antara pemerintah daerah dalam menciptakan iklim bisnis yang baik, tingkat pendidikan belum terlalu berkualitas sehingga lulusan dari universitas maupun

sekolah-sekolah tinggi belum terserap baik dalam dunia kerja saat ini. Padahal kebijakan fiskal yang baik menyediakan pekerjaan bagi masyarakatnya, memberikan akses infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang memadai serta meningkatnya kehidupan sosial masyarakat.

Kesesuaian Kebijakan Fiskal di Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kebijakan Fiskal Abdul Mannan Sebagai Solusi Penerapan Pembangunan Sosial Ekonomi di Indragiri Hilir

Mannan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mannan, 1997). Sehingga dengan hal ini kebijakan fiskal Abdul Mannan yang mengedepankan prinsip kebahagiaan bagi masyarakat seharusnya didukung dari infrastruktur dan birokrasi pemerintahan yang baik dalam melayani kebutuhan masyarakat. Namun, infrastruktur di daerah Indragiri Hilir masih terbilang sangat lambat pembangunannya, birokrasi pemerintahan di Inhil juga sangat tidak kondusif.

Kenyataan di lapangan terlalu banyak ketimpangan dan perbedaan antara tujuan dan harapan dengan realita yang terjadi. Banyak yang belum sesuai dengan teori-teori fiskal maupun ekonomi secara umum apalagi dengan teori fiskal Islam. Birokrasi jauh dari kata membahagikan bagi masyarakat, *dana corporate social Responsibility* Perusahaan atau lembaga yang mengambil untung di daerah, dikeluarkan sebatas mengeluarkan tanpa memperhitungkan besaran kerugian

masyarakat asalkan perusahaan mendapat untung yang besar, bahkan bank syariah tidak memberikan sumbangsi bagi pendapatan daerah dan pembinaan masyarakat. Hal ini sangat lah diluar batas ketidak nyamanan bagi masyarakat, mereka menjadi korban atas kesewenangan perusahaan besar ataupun ketidakadilan oknum birokrasi. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustaqimah, dkk yang menyatakan bahwa kondisi yang ada menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan hasil-hasil pembangunan. Karena, diduga bahwa hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat khususnya golongan tertentu saja. (Mustaqimah dkk., 2017)

Teori Mannan juga berbicara bahwa tujuan perusahaan dalam suatu negara atau daerah bukan hanya memaksimalkan keuntungan perusahaan, melainkan juga harus memperhatikan moral, sosial dan kendala institusional. Perusahaan tidak hanya sebagai pemasok komoditas tetapi juga menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar bersama pemerintah daerah. Mannan juga mengharapkan produksi suatu perusahaan melibatkan masyarakat dalam menghasilkan produk bagi kesejahteraan masyarakat. Karena, menurut penelitian yang dilakukan oleh Nukra, Mannan menyatakan bahwa proses produksi adalah usaha kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kesejahteraan ekonomi mereka, yang menimbulkan nilai persaudaraan, dan jika diaplikasikan ke dalam lingkungan ekonomi, akan melahirkan lingkungan kerja sama, bukan persaingan, bukan juga eksploitasi sumber daya alam (dan

manusia), agar dari proses perubahan tersebut sesuai dengan harapan dan dapat pula memajukan kehidupan masyarakat (Nukra, 2017). Tetapi kenyataannya beberapa perusahaan masih sering alfa dalam kontribusi untuk pembangunan daerah di Indragiri Hilir, tempat keberadaan perusahaan.

Terkait kebijakan fiskal yang sudah relevan dengan teori dari Mannan adalah adanya bantuan penanggulangan perbaikan kebun dan pemberian alat untuk perbaikan serta trio tata air yang juga masih dalam penanggulangan kerusakan kebun di Indragiri Hilir. Hal ini sangat penting dan sangat membahagiakan bagi sebagian besar masyarakat Inhil, karena untuk daerah Inhil yang mayoritas memiliki kebun, berprofesi sebagai petani dan kebun merupakan sumber ekonomi utama didaerah serta untuk rakyat. Sehingga program ini sangat cocok dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat Indragiri Hilir.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 2011). Pembentukan institusi baru untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat belum terbentuk, industri-industri alternatif

belum bisa menutupi jumlah masyarakat yang dapat bekerja, didaerah Indragiri Hilir peluang kerja masih sangat terbatas. Namun, menurut penelitian yang dilakukan apriyani, sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja. meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya. (Apriyani, 2016).

Dalam tabel 1 pemaparan terkait kesesuaian dan ketidak sesuaian kebijakan pemerintah daerah dengan perspektif Mannan dari pembahasan sebelumnya, pada tabel *pertama* dianggap sesuai karena adanya program pendidikan magrib mengaji untuk membangun nilai spiritual anak-anak, keberadaan kampus sehingga masyarakat memiliki jalan untuk mengenyam dan mendapatkan pengetahuan yang lebih, lembaga pendidikan anak usia dini di satu desa yang mampu melahirkan anak-anak usia dini yang berakhlak dan cerdas, serta apresiasi masyarakat terhadap kegiatan *Islamic Events* membuktikan pemerintahan yang mementingkan pembangunan spiritual dengan konsisten mengadakan acara-acara keislaman. Pemaparan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustaqimah dkk, dalam penelitian mereka menyatakan bahwa pendidikan jmemiliki pengaruh yang sangat nyata dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia.(Mustaqimah dkk., 2017).

Tabel 1
Kesesuaian Kebijakan Fiskal Indragiri Hilir dengan Kebijakan Fiskal Abdul Mannan.

No.	Kesesuain	Alasan	Teori Mannan yang sesuai
1.	Pendidikan Islami dan Moral	- 1 Desa 1 PAUD - Magrib Mengaji - <i>Islamic Events</i>	Individu dan daerah harus bekerja sama menciptakan masyarakat yang baik, salah satunya dengan Pendidikan
2.	Pembangunan Ekonomi dalam hal Perbaikan Perkebunan	- 1 Kecamatan 1 <i>Excavator</i> (alat pengeruk) - Trio Tata Kelola Air - Resi Gudang	Dalam ekonomi Mannan peran Negara sangat penting dalam memajukan ekonomi masyarakat, dengan jalan kebijakan fiskal dan penyediaan kebutuhan dasar dalam suatu daerah. Karena masyarakat Inhil masyarakat yang bekerja di bidang agraris maka perbaikan perkebunan merupakan hal yang urgen.
3.	Inovasi pajak yang mulai dilakukan	- Jemput Bola terhadap Pajak didesa-desa - Melakukan studi banding kedaerah dengan tata kelola perpajakan yang baik. - Pajak bagi usaha masyarakat yang potensial dan layak terkena pajak	Implementasi zakat dalam ekonomi Mannan menjadi hal dasar untuk pemenuhan bagi masyarakat, sehingga pajak yang juga merupakan kewajiban warga Negara harus terus di inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah
4.	Birokrasi yang belum kondusif	- Pelayanan yang tidak memadai - Disiplin tenaga birokrasi yang lemah	Kerja sama yang baik antara Negara dan individu juga harus diwujudkan sehingga birokrasi yang kurang baik merupakan hal yang sangat menyalahi dalam teori Mannan.

5. Infrastruktur dan pembangunan yang Lamban	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada beberapa desa yang akses listrik tidak memadai - Banyak jalan penghubung yang rusak - Alat transportasi yang tidak dilengkapi dengan alat <i>safety</i> yang memadai 	Salah satu penyebab masyarakat tidak bahagia, tidak terpenuhinya kebutuhan akan infrastruktur padahal teori Mannan mengedepankan kebahagiaan bagi masyarakat
6. Peluang kerja yang Minim	<ul style="list-style-type: none"> - Iklim bisnis yang tidak mendapat perhatian khusus - industry-industri alternatif yang belum memadai 	Peranan Negara atau daerah menurut Mannan harus mampu mendorong partisipasi berkeadilan termasuk dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan.

Sumber: Diolah,2018

Tabel pada point *kedua* pembangunan ekonomi masyarakat di Indragiri Hilir difokuskan dengan perbaikan perkebunan agar hasil perkebunan masyarakat dapat meningkat karena mayoritas berprofesi sebagai pekerja kebun, maka program ini tentulah membahagiakan sebagian besar masyarakat Indragiri Hilir dengan adanya program 1 Kecamatan 1 *excavator* (alat pengeruk), Trio Tata Kelola Air, Resi Gudang. Hal ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Indragiri Hilir.

Point *ketiga* berbagai upaya dan langkah dalam mengoptimalkan sumber PAD terus digali dari sejumlah potensi dan sektor, dalam peningkatan dan menggali potensi sumber pajak daerah Indragiri Hilir untuk meminimalisir keterhambatan pembangunan karena kurangnya dana. Inovasi yang dilakukan yakni, jemput bola

terhadap pajak didesa-desa, melakukan studi banding kedaerah dengan tata kelola perpajakan yang baik, dan juga pengambilan pajak untuk usaha-usaha masyarakat seperti tambang pasir yang dimiliki warga. Inovasi ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berpengaruh pada meningkatnya pendapatan daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarjono, dkk., yang menyatakan meningkatkan penerimaan pajak daerahnya, maka meningkat pula pendapatan daerah yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi (Sarjono & Anwar, 2018).

Hal yang belum sesuai dengan prinsip kebijakan fiskal mannan adalah belum dijadikannya wakaf sebagai sumber untuk pembangunan infrastruktur daerah, dan permasalahan yang mempersulit

pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat seperti Birokrasi yang tidak kondusif di beberapa Instansi, Infrastruktur dan pembangunan yang lamban, dan peluang kerja yang minim. Sehingga menjadikan banyak keluhan di masyarakat dan kesulitan masyarakat ini juga berdampak ke banyak aspek.

Islam dalam konteksnya mengungkapkan bahwa peran negara dilakukan dalam rangka melanjutkan misi kenabian (Al-Mawardi, 1995). Yaitu pencapaian *maqashid syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah). Negara sebagai agen Tuhan untuk merealisasikan *maqashid syari'ah*. Sebagai contoh, pada negara Islam pengalokasian sumber-sumber daya yang tidak sesuai dengan tujuan syara' tidak dibenarkan. Karena itu, penerimaan keadilan dan persamaan menjadi komponen esensial dalam kebijakan publik (*public policy*) (Jaelani, 2012). Jadi, kemaslahatan yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi kata kunci. Sama halnya dengan Mannan yang menganggap bahwa dalam kebijakan fiskal bukan hanya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang harus diutamakan untuk menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat namun juga aspek moral yang harus diasah.

Aspek moral yang terus diasah ini harus melalui pendekatan agama, dan pendidikan, sehingga program yang berjalan baik di Indragiri Hilir yakni terkait program Magrib Mengaji dan keberadaan 1 desa 1 sekolah Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) merupakan hal yang harus diapresiasi. Menurut Mannan Sistem sosial ekonomi islam dengan sistem ekonomi lain yang membedakannya adalah sifat motivasional yang mempengaruhi pola, struktur, arah,

dan komposisi produksi distribusi serta konsumsi (Mannan, 1997). Teori Mannan ini harus diterapkan dalam sebuah daerah yang memiliki motivasi untuk pembangunan sosial ekonomi yang sesuai dengan islam, begitupun dengan kebijakan fiskal daerahnya. Sehingga masyarakat dan daerah yang ingin mencapai masyarakat madani bisa dimulai dengan melakukan penerapan nilai-nilai Islam dalam keseharian.

Ekonomi Islam sebagai salah satu ilmu sosial perlu kembali kepada sejarah dalam melaksanakan eksperimen-eksperimennya dan menurunkan kecenderungan jangka jauh dalam berbagai umahan ekonomi (Al Arif, 2015). Kembali kepada sejarah disini misalnya zakat dan wakaf dijadikan instrument fiskal dimasa sekarang karena penggunaan utang sebagai instrument fiskal daerah bahkan negara sudah membuat resesi dunia semakin parah, penumpukan utang Negara dan daerah tidak bisa dibendung lagi. Sehingga sangat perlu dicarikan solusi yang memungkinkan dalam suatu daerah atau dijadikan sebagai Perda mengingat masyarakat di daerah Indragiri Hilir juga merupakan masyarakat yang mayoritas muslim, tentunya hal ini juga mengatasi deficit anggaran yang sering terjadi didaerah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh, yang menyatakan bahwa Abdul Mannan juga mengusulkan adanya Dana Zakat Rakyat (*People's Zakat Trust*) dalam perencanaan pembangunan.(Syahputra, 2015).

Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, hal ini menjadi alasan kuat dalam pembangunan sosial ekonomi yang baik diperlukan kebijakan pemerintah yang mendukung

kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam teori Mannan kesejahteraan dan kebahagiaan sangat dikedepankan prinsip dalam teori Mannan sesuai dengan tujuan dari ekonomi Islam yang menginginkan kesejahteraan bersama dalam suatu Negara atau daerah. Hal ini akan meminimalisir ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat secara sosial, dan melahirkan masyarakat bahagia karena terpenuhinya semua kebutuhan dasar masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan penelitian syahputra yang menyatakan bahwa perlunya melakukan evaluasi terhadap volume, tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya, agar dapat memaksimalkan kesejahteraan (Syahputra, 2015).

PENUTUP

Kesimpulan

Potret pembangunan secara data menunjukkan adanya pertumbuhan namun pembangunan infrastruktur dinilai lambat, birokrasi yang kurang kondusif, pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena harga komoditas sering mengalami penurunan harga jual, iklim bisnis yang belum berjalan dengan baik, lulusan dari universitas maupun sekolah tinggi belum terserap baik dalam dunia kerja saat ini. Padahal kebijakan fiskal yang baik salah satunya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pembangunan sosial ekonomi di Indragiri Hilir saat ini di utamakan dalam bidang pertanian dan perbaikan perkebunan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah Indragiri Hilir merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan sangat memprihatinkan. Padahal Abdul Mannan dalam kebijakan

fiskalnya yang mengedepankan prinsip kebahagiaan (*at-targib*) bagi masyarakat. Hal yang sudah sesuai dengan prinsip kebahagiaan yakni adanya bantuan penanggulangan perbaikan perkebunan masyarakat serta trio tata air yang juga merupakan program penanggulangan kerusakan perkebunan di Indragiri Hilir. Program lainnya yang cukup relevan yakni program magrib mengaji yang sangat diapresiasi untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia yang baik dan bermoral. Dinas pendapatan daerah juga sedang gencar melakukan evaluasi untuk meningkatkan pendapatan demi kelancaran pembangunan yang selama ini banyak terhambat.

Saran

Penelitian ini untuk pembangunan sosial ekonomi di Indragiri Hilir lebih baik, sehingga setelah melihat kondisi di lapangan perlunya agar pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih ketat terkait kinerja birokrasi, kinerja tim lapangan dalam pembangunan infrastruktur dan melakukan inovasi untuk memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat; Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta seharusnya bersinergi dengan mengembangkan produk-produk pertanian dan perkebunan untuk dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan dapat didistribusikan secara merata hingga keluar daerah, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta mendukung iklim bisnis daerah; permasalahan terkait pihak swasta yang ada di Indragiri Hilir beberapa diantaranya tidak melakukan kewajiban pembayaran *Cooperate Social Responsibility* pemerintah seharusnya melakukan tindakan tegas untuk hal-hal

semacam ini. Karena sumbangsi pihak swasta akan sangat bernilai untuk

kemajuan daerah dan masyarakat setempat dalam pembangunan sosial ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Mawardi, A. H. A. bin M. (1995). *Adab Al-Dunya Wa Al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Apriyani, Y. (2016). *Pemikiran M. Abdul Mannan Tentang Produksi Berbasis Kesejahteraan Ekonomi* (s1). UIN Walisongo, Malang.
- Arsyad, L. (2011). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2016). *Perubahan RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018*. Tembilahan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. (2014). *Data Statistik Sektoral Kabupaten Indragiri Hilir 2013*. Indragiri.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. (2017). *Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 2016*. Indragiri.
- Bupati Inhil “Wardan” Paparkan Keunggulan Pertanian Kelapa Dihadapan Komisi B DPRD Riau 2015. (2015). *detakriau.com*.
- Caska, & Riadi, R. (2008). *Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Riau*. *JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan)*, 12(21).
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Cet.3). Jakarta: Salemba Humanika.
- Hermansyah, H. (2015). *Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Nasional*. Diambil 25 Desember 2018, dari http://harishermansyah84.blogspot.com/2015/04/makalah-pengaruh-kebijakan-fiskal_28.html
- Jaelani, A. (2012). *Pengelolaan APBN dan Politik Anggaran di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Al-Qalam*, 01.
- Mannan, M. A. (1997). *Islamic Economics, Theory and Practice*, Terj: M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mth, A. (2003). *Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*. *Al-Mawarid*, 10(0).
- Mannan, Muhamma Abdul., 1997, *Islamic Economic Theory and Practice*, alih Bahasa M. Nastangin, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Cet. 1. Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa.
- Mawardi, Al., 1995, *Adab al-Dunya wa-al-Din*, Beirut: Dar al-Fikr
- Muammar, K. (2009). *Faktor Kegemilangan Tamadun Islam:*

- Pengajaran Dari Masa Lalu. *Jurnal Hadhari*, 01(02), 15–31.
- Mustaqimah, K., Hartoyo, S., & Fahmi, I. (2017). Peran Belanja Modal Pemerintah Dan Investasi Pembangunan Manusia Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 6(2). Diambil dari <http://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/view/22391>
- Nukra, N. (2017). *Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Pengembangan Ekonomi Islam Era Modern*. STAIN Parepare.
- Rubby, I. (2018, Desember). Sistem Resi Gudang Jadi Cara Kabupaten Indragiri Hilir Selamatkan Perkebunan Kelapa. *Tribun Pekanbaru.com*.
- Sarjono, N., & Anwar, C. (2018). Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat, 6(12), 15.
- Sukma, R. (2015). Strategi Pembangunan Sosial: Upaya Pengentasan Masalah Kemiskinan. Diambil 25 Desember 2018, dari <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/6010>
- Supangat. (2013). Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 91. <https://doi.org/10.21580/economic.a.2013.4.2.781>
- Syahputra, R. (2015). Studi Pemikiran Ekonomi Islam Modern Prof. Muhammad Abdul Mannan, M.A., Ph. D Telaah Terhadap Buku “Islamic Economics; Theory And Practice.” *ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen)*, 2(2), 93–111.
- Ulum, F. (2009). Telaah Kritis Atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan. *Al-Qanun*, 12(02).